

Hidayatulloh, P., & Khisbiyah, Y. (2019). Kesiapan birokrasi dalam menerapkan kebijakan sistem kredit karakter mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi*, (4)1, 18-27. doi: <https://doi.org/10.23917/indigenous.v4i1.5956>

## Kesiapan Birokrasi dalam Menerapkan Kebijakan Sistem Kredit Karakter Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta

Paksi Hidayatulloh<sup>1</sup> dan Yayah Khisbiyah<sup>2</sup>

Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta<sup>1,2</sup>  
paksi.disini@gmail.com | yayah.khisbiyah@ums.ac.id<sup>2</sup>

**Abstraksi.** Keberhasilan mahasiswa tidak hanya dibentuk melalui pembelajaran perkuliahan (kurikuler) namun akan lebih maksimal melalui proses pembelajaran ekstra-kurikuler yang dibentuk oleh Sistem Kredit Karakter Mahasiswa (SKKM). Regulasi telah dirancang dalam buku pedoman Sistem Kredit Karakter Mahasiswa yang dilahirkan dari konsensus bersama antara pimpinan universitas, pimpinan fakultas, dan pimpinan program studi. Penelitian ini mengkaji kompleksitas implementasi kebijakan kredit poin sebagai layanan publik dalam perspektif psikologi sosial/politik, dimulai dari skala mikro yaitu percontohan di fakultas dan program studi sebelum diterapkan dalam skala makro yaitu universitas. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan informan penelitian pimpinan rektorat, pimpinan fakultas, dan pimpinan program studi baik yang sudah menerapkan ataupun yang belum menerapkan kebijakan kredit poin SKKM. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa karakteristik kepribadian, identitas sosial, nilai-nilai, keyakinan, dan kelekatan terhadap kelompok dapat memengaruhi perilaku politik dalam pengambilan kebijakan. Penetapan kebijakan mempunyai peran strategis dalam hierarki kontrol bagi pengembangan karakter mahasiswa yang dinilai dari keseimbangan kemampuan soft skills dan hard skills yang terlegitimasi dalam sistem kebijakan yang terlembagakan di civitas akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta.

**Kata Kunci:** hard skills; kebijakan perguruan tinggi; pengambilan keputusan birokrasi; soft skills; sistem kredit karakter mahasiswa

**Abstraction.** Student's achievement is not only formed by classroom learning (curricular) but also by extracurricular learning as managed by Student Character Credit System (SKKM). This regulation was generated in Student Character Credit System (SKKM) guide book which based on the concensus among the chiefs of the university, faculty and department. This current study analyzes the complexity of the implementation credit point policy as a public service in the social or political psychology perspective, begins from the micro scale such as the faculty policy and department before it's applied on the macro scale (university level). This qualitative study implicates rector board and chief of faculty as well as chief of departments as its informants about the implementation SKKM. The result shows that the characteristic of personality, social identity, values, believe and attachment towards community are able to influence a political behavior in determining the policy. It has a strategic role in the hierarchy of control for the student's character development assessed from the soft and hard skills and legitimated in the institutionalized policy in the academic community of Universitas Muhammadiyah Surakarta.

**Keyword:** bureaucracy decision making; hard skills; higher education policy; soft skills; Students Character Credit System

## PENDAHULUAN

Kompetensi mahasiswa yang termasuk *soft skills* mencakup kompetensi kepribadian dan sosial. Kompetensi kepribadian disebut dengan *intrapersonalskills* sedangkan kompetensi sosial disebut *interpersonalskills*. Berthal (dalam Muqowim, 2012) mendefinisikan *soft skills* sebagai perilaku personal dan interpersonal yang mengembangkan dan memaksimalkan kinerja manusia seperti membangun tim, pembuatan keputusan, inisiatif, dan komunikasi. Neff & Citrin (dalam Muqowim, 2012) mengatakan bahwa yang paling menentukan kesuksesan bukanlah keterampilan teknis melainkan kualitas diri yang termasuk dalam keterampilan lunak (*soft skills*) atau keterampilan yang berhubungan dengan orang lain (*people skills*). *Soft skills* tidak termasuk kemampuan teknis melainkan non-teknis, ketrampilan yang dapat melengkapi kemampuan akademik, dan kemampuan ini harus dimiliki oleh setiap orang, apapun profesi yang ditekuni.

Proses pendidikan tidak hanya berlangsung di kelas, berbeda dengan mengajar yang pada umumnya hanya di kelas. Mendidik adalah proses transfer nilai (*transfer of values*), sedangkan mengajar merupakan proses transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*). Direktorat Akademik Ditjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional (2008) mengatakan bahwa keberhasilan pendidikan 80% ditentukan oleh *soft skills* yaitu kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial, dan hanya 20% oleh *hard skills* yaitu kompetensi pedagogik dan profesional. Hasil penelitian dari Harvard University Amerika Serikat tentang dunia pendidikan di Indonesia (dalam Muqowim, 2012) menegaskan pendidikan di Indonesia memberikan kontribusi *soft skills* hanya 20% dan yang 80% bersifat *hard skills*. Ketidakseimbangan ini harus segera diatasi dengan melakukan perubahan regulasi secara sistemik dan berkelanjutan yang didasarkan pada analisa proses pendidikan.

Hasil penelitian-penelitian di atas mengukuhkan argument bahwa keberhasilan seorang sangat ditentukan oleh penguasaan *soft skills* ketimbang *hard skills*, sehingga perlu strategi

pendidikan untuk mengatasi permasalahan ini. Buku pedoman Sistem Kredit Karakter Mahasiswa atau SKKM (2012) menjelaskan bahwa program pengembangan pendidikan karakter mahasiswa dilakukan melalui dua jalur utama. *Pertama*, jalur kulikuler, yaitu melalui penyempurnaan kurikulum, rencana mutu pembelajaran, strategi dan media pembelajaran. *Kedua*, jalur ekstra kulikuler, yaitu melalui organisasi mahasiswa dan unit kegiatan mahasiswa. Kedua jalur inidapat diimplementasikan melalui 4 bagian: *written curriculum* yaitu mata kuliah dan implementasi pembelajaran, *hidden curriculum* yaitu interaksi dosen dan mahasiswa, *co-curriculum* yaitu mentoring, praktik dan magang, dan *extra-curriculum* yaitu organisasi mahasiswa. Elemen kompetensi *soft skills* menurut Kepmendiknas Nomor 45/U/2002, mencakup beberapa hal, yakni; landasan kepribadian yang merupakan ranah dari *hidden curriculum*; penguasaan ilmu dan keterampilan yang merupakan ranah dari *written curriculum*; kemampuan berkarya yang merupakan ranah dari *co-curriculum*; sikap dan perilaku dalam berkarya yang merupakan ranah dari *co-curriculum* dan *extra-curriculum*; dan pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat yang merupakan ranah dari *co-curriculum* dan *extra-curriculum*.

Pengembangan *soft skills* di luar kelas yang melengkapi pembelajaran kelas harus menjadi upaya strategis, agar potensi intrapersonal dan interpersonal mahasiswa dapat diwujudkan secara nyata. Pengembangan interpersonal atau karakter sosial terpuji akan lebih dimaksimalkan melalui keikutsertaan dan berperan aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Disitulah kemampuan memimpin, ketangguhan, kemampuan berkomunikasi, percaya diri, kemampuan menyelesaikan masalah dan empati mahasiswa akan dibentuk. Mahasiswa yang aktif berorganisasi biasanya mempunyai ketrampilan dalam mengatasi berbagai masalah sehingga ketika lulus tidak canggung untuk berkiprah dalam bermasyarakat. Realita yang terjadi, keterlibatan mahasiswa dalam organisasi internal kampus kurang dari 10% dari jumlah keseluruhan mahasiswa aktif sekitar 28.000 (data dari BAA UMS, 2015).

**Tabel 1: Hasil Survei NACE USA Mengenai *Soft Skills* di Dunia Kerja**

No	Kualitas	Skor
1	Kemampuan berkomunikasi	4,69
2	Kujujuran/integritas	4,59
3	Kemampuan bekerja sama	4,54
4	Kemampuan interpersonal	4,55
5	Etos kerja yang baik	4,46
6	Memiliki motivasi	4,42
7	Mampu beradaptasi	4,41
8	Kemampuan analitikal	4,36
9	Kemampuan komputer	4,21
10	Kemampuan berorganisasi	4,05
11	Berorientasi pada detail	4
12	Kemampuan memimpin	3,97
13	Percaya diri	3,95
14	Berkepribadian ramah	3,85
15	Sopan/beretika	3,82
16	Bijaksana	3,75
17	IP $\geq$ 3,0	3,68
18	Kreatif	3,59
19	Humoris	3,25
20	Kemampuan eterpreneurship	3,23

*\*Skala 1-5 (5 tertinggi)*

Menyikapi realitas tersebut, pihak universitas berinisiatif membuat buku Pedoman Sistem Kredit Karakter Mahasiswa (SKKM) tahun 2012 sebagai kerangka acuan dalam proses pembentukan karakter mahasiswa. Kebijakan kredit poin dibuat sebagai sarana dalam menyeimbangkan peranan *soft skills* dan *hard skills*, yang pada intinya sebagai syarat mendapatkan gelar kesarjanaan mahasiswa tidak hanya dituntut dengan IPK yang tinggi (bersifat akademik), namun juga wajib menyerahkan sertifikat keikutsertaan dalam organisasi/kegiatan/seminar/kejuaraan, dan bukti lain sebagai tanda keaktifan dalam kegiatan yang bersifat non akademik sebagai kelengkapan pemenuhan kredit poin. Mencermati keputusan yang dibuat seorang pemimpin ada beberapa aspek individual dalam menjelaskan perilaku. Lewin (dalam Cottam, Beth, Elena, & Thomas, 2012) berpendapat bahwa untuk memahami perilaku perlu memahami kepribadian seseorang dan menekankan interaksi antara seseorang dengan situasi tertentu.

Hermann (dalam Cottam, Beth, Elena, & Thomas, 2012) menegaskan bahwa setiap jenis unit pengambilan keputusan mempunyai

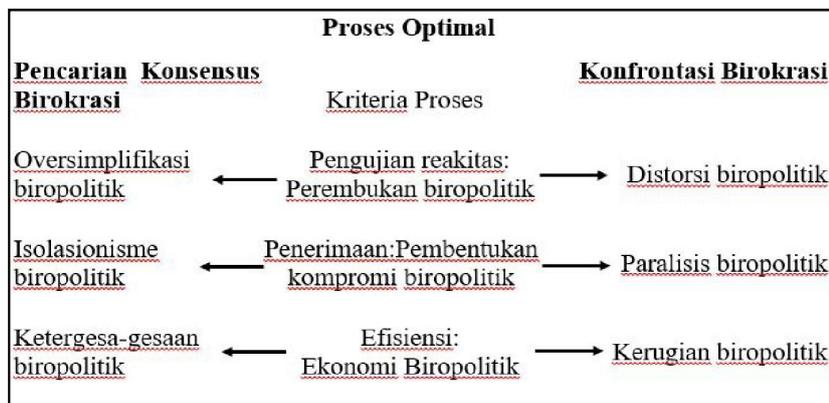
proses yang berbeda dan pola perilaku yang berbeda. Tiap unit pengambilan keputusan dapat dianalisis dengan konsep psikologi politik. Pada penyampaiannya, seseorang dapat bertindak ketika terdorong oleh faktor internal dan eksternal. *Pertama*, faktor internal meliputi kepribadian, proses kognitif, sikap, dan emosi. *Kedua*, faktor eksternal meliputi identitas sosial dan nilai-nilai., Faktor terpenting, dalam unit pemimpin predomain, yang memengaruhi bagaimana kelompok tersebut bertingkah laku dan membuat keputusan adalah karakteristik kepribadian pemimpinnya. Kepribadian adalah faktor pokok yang dapat mempengaruhi perilaku politik dalam pengambilan keputusan. Sebagian orang mempunyai sifat-sifat yang sama seperti tingkat kompleksitas tertentu pada proses-proses berfikir, hasrat akan kekuasaan, dan pencapaian.

Kepribadian cenderung sangat stabil perihal tingkat kapasitasnya, adapun perubahan dikarenakan dinamika dari pengalaman hidup serta kepribadiannya dapat mempengaruhi perilaku secara berkelanjutan dan konstan. Kepribadian adalah suatu komponen inti dari mesin pemikiran dan perasaan politik. Fred

Greenstein (dalam Cottam, Beth, Elena, & Thomas, 2012) meninjau bahwa, meskipun kepribadian seringkali tidak begitu berpengaruh dalam pengambilan kebijakan namun terjadi pada dampak pribadi (aktor politik): *pertama*, meningkat hingga sejauh mana lingkungannya memungkinkan restrukturisasi; *kedua*, bervariasi sejalan dengan lokasi/situasi aktor politik tersebut di lingkungannya; dan *ketiga*, ketika individu-individu memiliki sumber kekuasaan pribadi dikarenakan posisi mereka dalam sistem politiknya (jabatan) sehingga dapat memengaruhi proses kebijakan.

Studi dari Preston & Hart; Stern & Sundelius; Vertzberger (dalam Cottam, Beth,

Elena, & Thomas, 2012) tentang politik birokratis yang berfokus pada karakteristik kelompok pengambilan keputusan di birokrasi. Studi ini telah memungkinkan analisis terhadap keseluruhan cakupan pola pengambilan keputusan yang dapat muncul dari interaksi kelompok di birokrasi, hingga konflik ekstrem antar kelompok yang cenderung mengarah pada peperangan birokrasi. Konsensus dan kohesi akan terjadi dalam kelompok ketika ada tekanan yang intens yang disebabkan oleh konflik. Oleh karena itu, birokrasi bisa menjadi tempat terjadinya serangkaian panjang perilaku-perilaku yang dihasilkan oleh kelompok-kelompok.



Gambar1: Politik birokratis: Dimensi-dimensi normatif

Preston dan 't Hart (dalam Cottam, Beth, Elena, & Thomas, 2012) telah berpendapat bahwa tingkat aktualisasi politik birokratis meliputi proses pengambilan keputusan berubah-ubah, dan merupakan hal yang penting untuk melihat politik birokratis sebagai sebuah kontinum yang didalamnya terdapat dinamika-dinamika yang memiliki tingkat konsekuensi (positif dan negatif) yang berfarisasi pada kualitas proses pengambilan keputusan.

Tiga kriteria yang dikembangkan oleh George (dalam Cottam, Beth, Elena, & Thomas, 2012), untuk mengevaluasi kualitas pengambilan pada kontinum tersebut. Tiga kriteria tersebut antara lain: *Pertama*, pengujian realitas (Apakah informasi sampai pada para pembuat keputusan pusat, dan apakah ada beberapa opsi pertimbangan?). *Kedua*, penerimaan (Apakah para pemain relevan melibatkan diri

di dalam kelompok pengambilan keputusan, dan apakah mereka didengar?). *Ketiga*, efisiensi (Apakah ada biaya-biaya dari proses pengambilan keputusan tersebut?). Preston dan 't Hart (dalam Cottam, Beth, Elena, & Thomas, 2012) berpendapat bahwa pada ujung spektrum konsensus, seseorang memandang patologi-patologi pengambilan keputusan: over simplifikasi biropolitik ketika pengujian realitas buruk, isolasionisme biropolitik ketika penerimaan buruk, dan pengambilan keputusan biropolitik yang tergesa-gesa ketika efisiensi buruk. Pada ujung skala konflik ekstrem, distorsi biropolitik ketika pengujian realitas buruk, paralisis biropolitik ketika penerimaan buruk, dan kerugian biropolitik ketika efisiensi buruk.

Fromm (dalam Cottam, Beth, Elena, & Thomas, 2012) mengeksplorasi interaksi-interaksi antara orang-orang dalam masyarakat

dan berpendapat bahwa perubahan dalam masyarakat dapat menghasilkan kebebasan dari pengekangan sehingga masyarakat humanis dapat mengejar suatu kebebasan positif yang didalamnya orang-orang memperlakukan satu sama lain dengan menyertakan rasa hormat dan rasa cinta atau mereka dapat melepaskan kebebasan dan menerima sistem politik dan sistem sosial yang totaliter dan otoriter. Kebutuhan akan kekuasaan merupakan sebuah karakteristik kepribadian yang selama ini telah dipelajari secara luas dan dikaitkan dengan jenis-jenis perilaku dan gaya-gaya interaksi yang spesifik dengan orang lain (Winter dkk, dalam Cottam, Beth, Elena, & Thomas, 2012). Secara khusus seseorang akan menduga para pemimpin yang memiliki kebutuhan psikologis akan kekuasaan yang semakin tinggi akan semakin dominan dan asertif pada gaya kepemimpinan mereka saat menjabat dan menuntut kontrol yang lebih besar atas bawahannya dan keputusan-keputusan kebijakan.

Hermann dkk (dalam Cottam, Beth, Elena, & Thomas, 2012) mengatakan bahwa pengalaman atau keahlian sebelumnya yang dimiliki oleh para pemimpin berdampak signifikan pada kepemimpinan, karakteristik interaksi kelompok dan seberapa kuat para pemimpin menegaskan posisi mereka dalam isu-isu kebijakan. Barber dkk, (dalam Cottam, Beth, Elena, & Thomas, 2012). Pengalaman masa lalu menyediakan para pemimpin suatu pendirian tentang tindakan apa yang akan efektif dan tidak efektif dalam situasi-situasi politik yang spesifik, serta manakah petunjuk dari lingkungannya yang seharusnya diperhatikan dan mana yang tidak relevan. Dilihat dari pengalaman masa lalu pemimpin dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam capaian pekerjaan tertentu. Keputusan politik dapat dibuat untuk menanggapi isu-isu yang dipersepsikan oleh para pemimpin sehingga setiap pengambilan keputusan memiliki cara yang berbeda dan pola perilaku yang berbeda tergantung pada dinamika yang terjadi di lingkungan kebijakan.

Thomas R. Dye (dalam Dunn, 2003) mengatakan suatu sistem kebijakan dibuat mencakup hubungan timbal balik diantaranya

tiga unsur yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan. Definisi dari masalah kebijakan tergantung pada pola keterlibatan pelaku kebijakan (*policy stakeholders*) yang khusus yaitu para individu atau kelompok yang mempunyai andil dalam kebijakan, misalnya warga masyarakat, pemimpin terpilih, dan para analis kebijakan yang berkenaan dengan lingkungan kebijakan. Lingkungan kebijakan (*policy environment*) yaitu konteks khusus dimana kejadian-kejadian di sekeliling isu kebijakan, memengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik. Sistem kebijakan berisi proses dialektis yang bersifat subjektif dan objektif dari pembuat kebijakan, sistem kebijakan merupakan realitas objektif yang dimanifestasikan kepada tindakan-tindakan yang teramati yang bersifat konsekuensi; para pelaku kebijakan merupakan produk dari sistem kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan dapat diikhtirakan dalam musyawarah bersama yang menghadirkan segenap civitas akademika diantaranya pimpinan universitas, pimpinan fakultas dan keterwakilan mahasiswa ditingkat universitas dan fakultas. Mengingat makna dan sifat implementasi yang dapat dipahami dari berbagai dimensi, makna tahap ini dengan sendirinya menunjukkan signifikansinya. Matland (dalam Hamdi, 2014) mencatat bahwa literatur mengenai implementasi kebijakan secara umum terbagi dalam dua kelompok, yakni kelompok dengan pendekatan dari atas (*top-down*) dan kelompok dengan pendekatan dari bawah (*bottom-up*). Kelompok dengan pendekatan *top-down* melihat perancangan sebagai aktor sentral dalam implementasi kebijakan dan memusatkan perhatiannya dalam faktor-faktor yang dapat dimanipulasi pada tingkat sentral atau pada variabel yang bersifat makro. Pada lain sisi, kelompok *bottom up* menekankan pada kelompok-kelompok sasaran dan para penyedia layanan. Pemberian tekanan pada kelompok *bottom-up* didasarkan pada pemikiran bahwa kebijakan senyatanya dibuat pada tingkat lokal dan berfokus pada variabel mikro.

Model *top-down* memandang implementasi

kebijakan sebagai pelaksanaan secara tepat pada tujuan yang telah direncanakan dari tingkat atas oleh para pelaksana pada tingkat lapangan sehingga akan tercapainya tujuan. Model yang dibuat oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Hamdi, 2014) pada dasarnya dimaksud untuk mengidentifikasi hubungan antara kepentingan yang beragam dari analisis kebijakan, perhatian langsung pada faktor penentu dari kebijakan publik dan memberikan penekanan pada keterkaitan yang seringkali tidak sempurna antara kebijakan yang ditetapkan dengan pelayanan yang nyata dilakukan. Model pandangan lain pendekatan *top-down* juga dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier (dalam Hamdi, 2014) yang mendefinisikan implementasi sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar (*basic polity decision*), yang selalu terbentuk dalam peraturan perundang-undangan namun juga dapat berbentuk perintah eksekutif. Titik awal model ini terletak pada keputusan yang bersifat mengikat dalam implikasinya, para aktor yang berada di pusat pembuatan kebijakan dipandang sebagai relevansi untuk mewujudkan hasil yang ingin dicapai.

## METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai kesiapan birokrasi dalam menerapkan kebijakan sistem kredit karakter mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Informan penelitian dipilih dengan kriteria yaitu pimpinan rektorat bidang akademik dan bidang kemahasiswaan, serta fakultas percontohan yang sudah menerapkan kebijakan kredit poin yaitu Pimpinan Fakultas Ilmu Kesehatan dengan informan penelitian yaitu bidang kemahasiswaan beserta kaprodi kesehatan masyarakat dan kaprodi keperawatan, untuk yang belum menerapkan kebijakan kredit poin yaitu Fakultas Psikologi dengan informan penelitian yaitu dekan dan bidang kemahasiswaan. Pengambilan sampel diawali dengan melakukan komunikasi dengan dosen dan mahasiswa di beberapa fakultas di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

**Tabel. 3 Identitas Informan**

Informasi	Jabatan struktural
MD	Wakil Rektor Bidang Akademik
S	Kabagmawa, Bidang kemahasiswaan
TK	Dekan Psikologi
ASP	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Psikologi
TBS	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FIK
DA	Kaprodi Keperawatan FIK
OSP	Kaprodi Kesehatan Masyarakat FIK

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga dapat diceritakan pada orang lain (Sugiyono, 2008). Sebagian besar pendekatan kualitatif, analisis data tidak dilakukan dalam satu tahap saja setelah data terkumpul. Daymon & Holloway (dalam Sugiyono, 2008) menyebutkan bahwa analisis data kualitatif merupakan proses sistematis yang berlangsung terus-menerus, bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis kualitatif berkaitan dengan reduksi data yang berarti memilah-milah data yang tidak beraturan menjadi lebih teratur dengan cara mengkodekan, menyusunnya menjadi kategori (*catagorizing*) dan merangkum menjadi pola susunan yang sederhana, dan interpretasi data yang merupakan suatu kegiatan yang menggabungkan hasil analisis dengan pernyataan, kriteria atau standar tertentu untuk menjawab permasalahan. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2008) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa keberhasilan mahasiswa merupakan keserasian dari pengeloaan kurikuler (akademik)

dan ekstrakurikuler (aktifitas kemahasiswaan) yang seimbang dengan bermuara pada pengembangan kapasitas *soft skills* dan *hard skills* mahasiswa. Berdasarkan hasil wawancara dengan ditemukan bahwa:

*“Keberhasilan mahasiswa yaitu mampu mengintegrasikan tiga bagian yaitu sisi keilmuan, sisi kemampuan riset, implementasi bersama masyarakat.”* (TK, 11-18)

*“Keberhasilan mahasiswa adalah menguasai sesuai program studi yang dia ambil, mempunyai *soft skills* yang nantinya bermanfaat di lapangan kerja dan mempunyai akhlak atau karakter yang baik.”* (S, 21-30)

*“Mahasiswa yang dalam akademiknya baik tetapi sekaligus dia mempunyai kemampuan mengembangkan diri secara optimal/potensi yang dia miliki untuk membangun karakter dia.”* (MD, 28-47)

*“Mahasiswa tidak hanya kuliah saja, dia harus pandai membagi waktu dan membagi ruang, dimana dia harus di kelas dan dimana dia harus terlibat untuk berkegiatan.”* (S, 90-96)

Hermann (dalam Cottam, Beth, Elena, & Thomas, 2012) berpendapat bahwa setiap jenis keputusan yang diambil memiliki proses dan perilaku yang berbeda tergantung dengan dinamika yang terjadi. Pengambilan keputusan sangat dipengaruhi oleh karakteristik kepribadian, nilai keyakinan dan kelekatan dengan kelompok. Penelitian ini mendapatkan fakta bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang terpola, yang dilakukan sepanjang waktu dan melibatkan banyak keputusan. Pimpinan yang berkepentingan akan terus menerus (secara aktif) menggunakan persepsi logisnya dalam memengaruhi pemikiran dan perasaan pimpinan lainnya untuk bersepakat bahwa kebijakan sistem kredit karakter mahasiswa mampu menjawab persoalan perihal keseimbangan *soft skills* dan *hard skills* bagi mahasiswa, hal ini tentu dilandasi realita yang ada. Dibutuhkan kerangka objektif dalam mengidentifikasi kebijakan sebagai layanan publik dalam implementasi suatu kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa:

*“Dengan adanya SKKM dan ketentuan kredit-kredit tertentu itu menjadi target untuk mahasiswa, artinya mereka akan berlomba-lomba mencapai kredit poin”*(OSP, 185-190)

*“Kita memberikan aturan bahwa tuntutan mahasiswa untuk memenuhi kredit karakter mahasiswa itu sebetulnya ingin meningkatkan kiprah mahasiswa artinya mahasiswa dituntut aktif, aktif di luar pembelajaran kelas, aktif dalam kepanitiaan, aktif dalam keorganisasian sehingga mahasiswa tersebut mampu meningkatkan potensinya.”* (DA, 222-240)

*“Jadi SKKM itu baru konsep yang idenya itu bahwa lulusan itu harus dipegangi tentang *soft skills* dan *hard skills*.”* (TBS, 32-35)

*“Pertimbangannya adalah kita ingin mencetak mahasiswa yang unggul, yang kompetitif, yang tangguh, tidak mudah menyerah dengan keadaan sekitarnya, jadi yang betul-betul menjadi petarung, jadi lulusan UMS itu siap disandingkan dengan lulusan perguruan tinggi yang lain.”* (MD, 178-192)

Memahami keputusan birokrasi, Max Webber (dalam Mustafa, 2013) mengatakan hierarki birokrasi ditetapkan secara jelas dimana pemegang kebijakan mempunyai fungsi yang spesifik dalam menerapkan aturan secara universal. Penjelasan dalam buku pedoman sistem kredit karakter mahasiswa (2012) program pengembangan pendidikan karakter mahasiswa dapat direncanakan dan diimplementasikan melalui 4 bagian, yakni: *written curriculum* (mata kuliah dan implementasi pembelajaran), *hidden curriculum* (interaksi dosen dan mahasiswa), *co-curriculum* (mentoring, praktik dan magang), dan *extra-curriculum* (organisasi mahasiswa). Hal ini memahamkan peneliti bahwa penerapan kebijakan sistem kredit karakter mahasiswa sebagai layanan publik akan membantu mahasiswa dalam menyeimbangkan *soft skills* dan *hard skills*nya. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa:

*“Dalam koridor akademik paling mudah itu*

*dengan aktifitas pengembangan diri mahasiswa masuk dalam kurikulum dan idealnya aspek pengembangan diri itu melekat pada masing-masing mata kuliah.” (MD, 28-40)*

*“Kalau dari versi di WR 1 itu adalah SKS tetapi SKS itu tentu menurut konsep kami itu ada kredit poin yang harus dicapai misalkan maksimal itu ada angka 300 kemudian dapat nilai apa? kalau 260 dapat nilai apa? mestinya begitu.” (S, 294-302)*

*“Seperti itu di lap, kaitannya dengan soft skills secara tidak langsung sudah mengikuti hard skills karena dengan metode teaching center learning dan student center learning, dengan metode ini mahasiswa dituntut aktif dalam pembelajaran.” (OSP, 120-132)*

*“Aktifitas pengembangan diri mahasiswa menjadi pintu untuk mengakumulasi kredit poin, mengobligasi capaian-capaian mahasiswa dimasing-masing mata kuliah tetap ada konten-konten pengembangan diri dengan instrument distruktur kurikulum (MD, 87-102)*

*“Yaa kita sebagai institusi pendidikan juga berusaha meningkatkan soft skills dan juga hard skillsnya”. (ASP, 71-74)*

Penetapan kebijakan mempunyai peran dalam kemajuan sebuah kelompok, Karft & Furlong (dalam Hamdi, 2014) mengatakan penetapan kebijakan (*policy legitimation*) merupakan mobilisasi dari dukungan politik dan penegasan kebijakan secara formal termasuk justifikasi untuk tindakan kebijakan. Sinergisitas elemen adalah kunci keberhasilan implementasi kebijakan dalam pengambilan kebijakan secara institusi. Thomas R. Dye (dalam Dunn, 2003) mengatakan suatu sistem kebijakan merupakan hubungan timbal balik dari tiga unsur yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan. Matland (dalam Hamdi, 2014) mencatat bahwa literatur mengenai implementasi kebijakan secara umum terbagi dalam dua kelompok, yakni kelompok dengan pendekatan dari atas (*top-down*) dan kelompok dengan pendekatan dari bawah (*bottom-up*). Penelitian ini menemukan fakta bahwa proses implementasi kebijakan

sistem kredit karakter mahasiswa merupakan hasil musyawarah bersama segenap pimpinan universitas, pimpinan fakultas dan program studi.

*“Semua mekanisme pembahasannya melibatkan semua program studi sehingga program yang kita luncurkan ini dampaknya besar dan bisa beresonansi dengan dosen, prodi dan mahasiswa.” (MD, 225-232)*

*“Semula itu adalah usulan dari bawah. Dari kemahasiswaan kemudian membentuk tim untuk merumuskan itu, bidang kemahasiswaan melihat bahwa pengembangan soft skills itu memang banyak dibidang kemahasiswaan, kami berusaha menyampaikan keberbagai pihak di kampus, kemudian terakhir muncullah yang namanya rapat kerja yang khusus membicarakan tentang itu, hasil rapat kerja itu merekomendasikan, artinya justru ini malah bottom up bukan top down. Merekomendasikan kepada pimpinan supaya pengembangan soft skills menjadi sesuatu yang harus.” (S, 157-179)*

*“Hanya saja implementasinya perlu di elek-projekkan, karena program-program dan kebijakan baru di UMS sangat banyak, kalau itu fokus akademik ada bidang satu. Untuk SKKM clause mekernya kan sekarang ada dibidang tiga universitas.” (TK, 89-100)*  
*“Kalau kebijakan ini dari WR 3, jadi di UMS itu kan yang namanya kebijakan itu bisa top down bisa bottom up. Top down itu dari atas ke bawah dan bottom up itu dari bawah ke atas, tapi juga melihat perkembangan di tingkat nasional dan internasional.” (TBS, 100-111)*

Perihal kebijakan pendidikan karakter yang tertuang dalam buku pedoman Sistem Kredit Karakter Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta merupakan manifestasi dari hasil rapat koordinasi nasional bidang kemahasiswaan tahun 2011 yang disampaikan oleh Direktur Jendral Pendidikan Tinggi yang tertuang dalam buku Pedoman Sistem Kredit Karakter Mahasiswa tahun 2012. Amitai Etzioni (dalam Wahab, 2004) menjelaskan bahwa melalui proses pembuatan

keputusanlah komitmen masyarakat yang acapkali masih kabur dan abstrak, sebagaimana nampak dalam nilai-nilai dan tujuan yang terbangun dari aktor politik ke dalam tindakan yang lebih kongkrit. Melihat fenomena di lapangan, kebijakan kredit poin sudah dimulai dari skala mikro dengan penerapan di program studi beberapa fakultas dan ke depannya akan ditransformasikan dalam pencapaian di tingkat makro yaitu universitas. Seperti hasil wawancara:

*"Kita terapkan untuk persyaratan pendadaran. Jadi bisa ujian skripsi kalau minimal dia punya poin 20 poin, kami masih memakai model kami, sebelum ada model SKKM yang ada itu."* (DA, 295-303)

*"Tidak semua mahasiswa memiliki kesadaran untuk mengembangkan soft skills, nampaknya dalam proses pembelajaran itu dalam tanpa petik perlu pemaksaan yang berorientasi positif."* (S, 262-267)

*"Dulu kita sudah sosialisasikan ke mahasiswa tentang pemberlakuan SKKM, di tahun ini kita nanti akan koordinasi dengan koordinator skripsi untuk sebagai salah satu syarat maju ujian skripsi."* (OSP, 237-243)

*"Yang merasa kurang poinnya, mereka juga bisa koordinasi dengan dosen untuk mengikuti pengabdian dosen, atau menjadi asisten peneliti, nanti dari prodi bisa memberikan sertifikat dan itu sebenarnya poin penting karena sekarang diberlakukan SKPI (Surat keterangan pendamping ijazah)."* (OSP, 304-336)

## KESIMPULAN

Dalam rangka pengembangan karakter mahasiswa, perguruan tinggi mempunyai peran strategis dalam mewujudkan visi mulianya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembentukan karakter unggul harus terus diupayakan, hal ini dapat dilakukan melalui dua jalur utama. *Pertama*, jalur kurikuler (melalui penyempurnaan kurikulum, rencana mutu pembelajaran, strategi dan media pembelajaran). *Kedua*, jalur ekstra kurikuler (organisasi mahasiswa dan unit kegiatan mahasiswa). Dalam upaya

pengoptimalan pendidikan karakter mahasiswa, maka lahirlah buku Pedoman Sistem Kredit Karakter Mahasiswa sebagai langkah kongkrit dalam menyeimbangkan kemampuan *soft skills* dan *hard skills* sehingga terwujudnya mahasiswa yang cerdas, kreatif, berkualitas dan berkarakter terpuji.

Penetapan kebijakan di institusi pendidikan, seyogyanya mampu meletakkan kerangka objektif melalui sinergisitas elemen kebijakan yaitu pengambil kebijakan, lingkungan kebijakan dan kebijakan publik sebagai dasar legitimasi dalam implementasinya. Penetapan kebijakan mempunyai peran penting dalam kemajuan kelompok (*in-group* dan *out-group*) secara institusi, hal ini mendasari bahwa kekuatan kelompok menjadi faktor yang menegaskan pengambilan keputusan pemimpin secara formal. Dalam hal ini, faktor kepribadian menjadi komponen utama dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Menurut peneliti, ketika pemimpin memiliki kebutuhan psikologis yang tinggi terhadap kekuasaan maka akan semakin dominan dalam mempengaruhi bawahannya dalam mengontrol sistem dan kebijakan yang akan diimplementasikan.

Pengalaman pemimpin akan menyediakan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan, memberikan petunjuk serta solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Kebutuhan psikologis dalam interaksi kebijakan akan berdampak pada gaya kepemimpinan, karakteristik kelompok dan penegasan posisi terhadap isu-isu kebijakan. Begitu juga proses perspektif, sikap dan perilaku aktor kebijakan akan merumuskan layanan publik sesuai mekanisme yang telah disepakati. Bahwa kebijakan sistem kredit karakter mahasiswa dalam perumusannya menggunakan pendekatan *bottom-up* yaitu usulan program dari pimpinan fakultas dan pimpinan program studi, melihat respon positif yang diterapkan di salah satu fakultas/program studi maka dibawahlah program ini dalam pembahasan universitas sebagai bentuk transformasi dan implementasi layanan publik.

---

## DAFTAR PUSTAKA

---

- Cottam, M. L., Beth, D.-U., Elena, M., & Thomas, P. (2012). *Pengantar psikologi politik*. Depok: Rajagrafindo
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan publik proses, analisis dan partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muqowim. (2012). *Pengembangan Soft Skills Guru*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Mustafa, D. (2013). *Birokrasi pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Nashori, F., & dkk. (2009). *Psikologi kepemimpinan*. Yogyakarta: Pustaka Fahima.
- Sugiyono. 2008. *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta
- Tim Kemahasiswaan UMS. (2012). *Pedoman sistem kredit karakter mahasiswa*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Wahab, S. A. (2004). *Analisis kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan egara*. Jakarta: Bumi Aksara.